

Pancasila Memperadabkan Bangsa

Yudi Latif

Setelah lebih dari tujuh dekade Pancasila ditahbiskan sebagai dasar (filsafat) negara, pandangan dunia, norma dasar, ideologi negara, dan kepribadian bangsa Indonesia, kita patut bertanya, apakah Pancasila masih relevan dengan perkembangan keadaan atau telah diusangkan zaman? Di sini terlihat situasi paradoksal. Sebagai kerangka konsepsi, Pancasila merupakan ideologi tahan banting yang kian relevan dengan perkembangan global kekinian. Namun, dalam kerangka operasionalisasinya, terdapat jurang yang lebar antara idealitas dan realitasnya.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara mengandung “pikiran yang sedalam-dalamnya”. Untuk merealisasikannya diperlukan prasyarat kecerdasan (dalam segala jenisnya), dengan usaha sungguh-sungguh “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Apalagi kerakyatan (demokrasi) yang diidealisasikan Pancasila juga “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan” (kecerdasan-kearifan). Lebih dari itu, tidak ada negara yang bisa maju dan meraih cita-citanya tanpa basis kecerdasan.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara sulit dibudayakan dalam kehidupan negara-bangsa dengan basis kecerdasan yang lemah. Sungguh mencemaskan, berbagai indikator menunjukkan bahwa kemampuan literasi, erudisi (budaya baca), numerasi, berfikir dan bernalar anak Indonesia, dan masyarakat pada umumnya, masih sangat rendah. Begitu pun hasil uji kompetensi guru secara nasional yang masih belum mencapai angka standar kompetensi minimal. Apalagi kalau dilihat dari ukuran yang berkaitan dengan tingkat keinovasian dan usaha memajukan perekonomian berbasis pengetahuan. Konsekuensinya, budaya ilmiah kita juga memprihatinkan. Lebih jauh, budaya demokrasi yang memerlukan kekuatan empati, rasionalitas dan argumentasi sulit dikembangkan dalam tradisi baca-tulis dan logika ilmiah yang lemah.

Pancasila sebagai pandangan dunia menghendaki tertib moral publik (*civil religion*). Pokok pikiran keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan perlunya penyelenggara negara untuk “memelihara budi-pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur”. Nilai Pancasila sulit ditumbuhkan dalam lahan keadaban yang tandus, tatkala kebanyakan warga lebih terobsesi “cinta kekuasaan” ketimbang “kekuatan mencintai”. Kemiskinan terparah suatu bangsa bukanlah kemiskinan sumberdaya, melainkan kemiskinan jiwa. Manakala warga negara cuma bisa bertanya apa yang bisa didapat dari negara; dan ketika penyelenggara negara cuma memburu kehormatan (*noblesse*), tapi tak mau memikul tanggungjawab (*oblige*) dari kehormatan itu.

Dengan membayangkan keluasan, kebesaran, dan kemajemukan bangsa, usaha membangun Indonesia tidak cukup mengandalkan modal sumberdaya alam, sumberdaya finansial, dan sumberdaya keterampilan. Yang lebih fundamental adalah modal-sosial, yang dapat diperkuat melalui perluasan jaring-jaring konektivitas (infrastruktur fisik dan non-fisik), dan inklusivitas (kesetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, permodalan, peran publik dan privilese sosial), dengan ikatan komitmen moral publik, yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya.

Generasi milenial hari ini mendapati konektivitas fisik yang jauh lebih baik dalam ketersediaan berbagai moda transportasi, jaringan perhubungan, teknologi telematika dan media digital. Namun, dengan pelemahan pada konektivitas hati (penyempitan ruang interaksi lintas-identitas) dan pikiran (kemunduran literasi dan erudisi), intensitas penggunaan media digital itu tidak sungguh-sungguh mengarah pada apa yang latelyr disebut sebagai media “sosial” (dari kata *socius*, yang artinya bersahabat, tersambung hangat). Malahan sebaliknya, sering mengarah menjadi media “a-sosial” (saling mencaci, saling merundung dan saling menegasikan, yang menimbulkan diskoneksi).

Pancasila sebagai norma fundamental negara dan ideologi negara menghendaki perwujudan negara Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Kendati sistem pemerintahan konstitusional Indonesia tidak menghendaki perwujudan negara otoriter, namun pemerintahan dan demokrasi tak bisa ditegakkan tanpa wibawa otoritas negara hukum. Tanpa kepastian dan penegakkan hukum, demokrasi bisa mengarah pada kekacauan. Demokrasi yang sehat memerlukan keseimbangan (*checks and balances*) antara negara yang “kuat” dengan masyarakat yang kuat.

Dalam konteks itu, aktualisasi Pancasila sebagai norma fundamental yang menghendaki penegakkan negara hukum, harus mencermati tendensi-tendensi yang mengarah pada realitas pelemahan sistem hukum nasional. Selain masih bercokolnya produk hukum bablasan kolonial, muncul pula berbagai produk perundang-undangan tanpa uji kesahihan Pancasila, yang saling bertabrakan secara vertikal (dengan peraturan pada hierarki di atasnya) dan horisontal (dengan peraturan yang lain dalam hierarki yang sama). Di luar itu, dikuatirkan pula tendensi politisasi hukum oleh tekanan-tekanan pragmatis kekuasaan serta kemerosotan wibawa hukum dalam mengatasi berbagai ekspresi kekerasan.

Keampuhan Pancasila sebagai ideologi menuntutnya menjadi “ideologi kerja” (*working ideology*) dalam praksis pembangunan. Dengan kata lain, ideologi Pancasila itu harus menjadi kerangka paradigmatis dalam pembangunan nasional, yang dibudayakan dalam tiga ranah peradaban: ranah nilai budaya (mental-spiritual-karakter) dalam kerangka “tata nilai”, ranah kelembagaan sosial-politik dalam kerangka “tata kelola” (*governancy*), ranah material-teknologikal dalam kerangka “tata sejahtera”. Semua rangkaian usaha

pembudayaan tersebut memerlukan pendekatan sosialisasi dan internalisasi Pancasila secara lebih kreatif dan holistik, meliputi dimensi kognitif, afektif dan konatif, yang dapat memengaruhi pola pikir, pola sikap dan pola tindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pembangunan sebagai Pemajuan Peradaban

Dalam membangun Indonesia, kita harus mengemban pesan moral lagu kebangsaan Indonesia Raya: “bangunlah jiwanya, bangunlah badannya”. Alhasil, yang dipedulikan bukan hanya pertumbuhan material, tetapi juga perkembangan kejiwaan. Bukan hanya infrastruktur “keras” (sarana fisik), tapi juga infrastruktur “lunak” (keadaban, pendidikan, kesehatan). Selain itu, dalam aktivitas pembangunan harus juga dipastikan bahwa yang semarak berkembang di sini bukan sekadar “pembangunan di Indonesia”, yang pelakunya bisa saja bukan orang Indonesia atau tidak berjiwa Indonesia, dengan hasil pembangunan yang dapat menyingkirkan dan mengasingkan bangsa sendiri. Yang harus lebih giat kita kembangkan adalah “pembangunan Indonesia”. Pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat Indonesia melalui pengolahan dan peningkatan nilai tambah sumberdaya Indonesia dengan sepenuh jiwa-raga Indonesia.

Dengan demikian, pembangunan pada hakekatnya merupakan usaha berkelanjutan dalam pemajuan mutu peradaban dengan cara meningkatkan kualitas hidup, dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional berlandaskan (kerangka keyakinan, pengetahuan dan tindakan) Pancasila. Adapun kualitas hidup dan peradaban ditinggikan melalui pemajuan kapabilitas dalam “tata nilai”, “tata kelola”, dan “tata sejahtera”. Tata nilai membangun kekuatan jiwa budaya kewargaan yang inklusif. Tata sejahtera membangun kemakmuran material yang inklusif. Tata kelola menjadi *enabler*, yang mendukung pembangunan rohani dan jasmani, melalui praksis politik yang inklusif.

Berbeda dengan pemikiran arus utama, yang sering memotret realitas (perkembangan) sosial sebagai fungsi (pengaruh) dari satu ranah tertentu secara satu arah. Misalnya, pengaruh budaya terhadap politik dan ekonomi; atau pengaruh politik terhadap budaya dan ekonomi; atau pengaruh ekonomi terhadap budaya dan politik. Dalam paradigma Pancasila diandaikan bahwa ketiga ranah tersebut saling berinteraksi dan saling memengaruhi secara dinamis, yang secara keseluruhan menentukan capaian kualitas hidup dan mutu peradaban.

Tata Nilai (Mental-Kultural)

Untuk dapat berkembang hebat, peradaban suatu bangsa harus tumbuh di atas landasan nilai budaya/kepribadian luhur (mental-spiritual-karakter). Meminjam ungkapan John Gardner, “Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayanya itu tidak mengandung dimensi nilai moral guna menopang peradaban besar.”

Nilai itu cahaya penuntun yang menerangi jalan menuju tujuan. Tanpa tuntunan nilai, sehebat apapun pembangunan fisik, kecerdasan dan keterampilan yang kita kerahkan tidaklah memberi nilai tambah yang signifikan, karena bisa tersesat di banyak tikungan.

Sebagai nilai inti moral publik, Pancasila bukanlah sebatas bahan hafalan, melainkan nilai hidup yang harus dialami dan dijalani penuh integritas, dengan menjaga konsistensi antara pikiran, perkataan, sikap dan perbuatan; antara keyakinan, pengetahuan, kebijakan dan tindakan.

Tata nilai Pancasila diarahkan untuk menjadikan bangsa yang berkepribadian mulia (berkarakter) dengan nilai utamanya berlandaskan sila pertama, kedua, dan ketiga. Bahwa kehendak untuk bersatu dan harmoni dalam perbedaan bisa diraih manakala kita mampu mengembangkan hubungan welas asih dengan “Yang Mahasuci”, yang memancarkan semangat ketuhanan yang berkebudayaan, lapang dan toleran; welas asih dengan sesama manusia, yang memancarkan semangat kemanusiaan yang adil dan beradab; welas asih dalam hubungan manusia dengan ruang hidup (tanah air) dan pergaulan hidupnya (kebangsaan), yang memancarkan semangat persatuan dalam keragaman bangsa. Dengan spirit Ketuhanan, kemanusiaan dan persatuan, dikembangkan daya-daya spiritualitas dalam sosiabilitas yang berperikemanusiaan, egaliter, mandiri, amanah (berintegritas), beretos kerja yang positif dan kreatif, serta sanggup menjalin persatuan (gotong-royong) dengan semangat pelayanan (pengorbanan).

Karena pembangunan nilai ini harus dibudayakan sejak dini (sejak dari buaian), di berbagai ruang (privat, komunitas, dan publik), dijaga sepanjang siang dan malam, dan secara berkelanjutan, maka ada keterbatasan negara sebagai agen pembudaya nilai. Oleh karena itu, agen sosial yang paling berkompetern untuk mengemban urusan tata nilai ini adalah komunitas. Nilai Pancasila yang semula digali dari nilai-nilai hidup yang tumbuh di berbagai komunitas Tanah Air, sudah sepantasnya dikembalikan ke komunitas sebagai perawat utamanya. Ada beberapa komunitas inti pembudayaan nilai Pancasila: komunitas sekolah, komunitas agama, komunitas pemukiman, komunitas kerja, komunitas media, komunitas minat-bakat, komunitas orpol dan ormas, serta komunitas adat. Setiap komunitas tersebut memiliki titik tekan dan pendekatannya tersendiri dalam membudayakan nilai Pancasila, namun secara keseluruhan membentuk rantai nilai Pancasila secara holistik dan integral.

Dengan dikembalikan ke komunitas, lembaga-lembaga negara (kecuali lembaga-lembaga kependidikan negara), ketimbang sibuk mengurus sosialisasi Pancasila kepada masyarakat sebagai pemborosan sumberdaya yang tidak efektif, lebih baik mengurus pembudayaan nilai di lingkungan komunitas kerjanya sendiri (penyelenggara negara dan jaringan kader kepemimpinan politik). Hal itu sesuai dengan tuntunan pokok pikiran keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. “Negara berdasar atas ke-Tuhanan, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, undang-undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk

memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.”

Alhasil, sebelum memancarkan masyarakat, penyelenggara negara harus terlebih dahulu memancarkan dirinya sendiri. Perlu diingat, pejabat dan aparatur negara tidak selalu punya kredibilitas dan kewibawaan untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada masyarakat. Terlebih dalam kondisi kemarau moral di lingkungan penyelenggara negara, yang diperlukan malah pembalikan peran. Justru tokoh-tokoh panutan masyarakatlah yang pantas menanamkan nilai Pancasila kepada penyelenggara negara.

Adapun lembaga-lembaga negara dengan tugas pembinaan nilai kebangsaan, dalam menjalankan tugasnya harus bekerjasama dengan komunitas-komunitas tadi sesuai dengan kelompok sasaran. Tugas paling penting yang bisa dikerjakan lembaga-lembaga negara tersebut adalah sejalan dengan fungsi negara dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia (menghormati, melindungi, memfasilitasi dan memenuhi) peran-peran individu dan komunitas dengan membuat pedoman dasar, kerangka regulasi, kode perilaku, fasilitasi, pengukuran dan monitoring, agar pembudayaan nilai yang dilakukan berbagai komunitas tadi memiliki irisan persamaan, koherensi dan jaminan mutu, sehingga secara serempak bisa memenuhi sasaran dan tujuan yang dikehendaki.

Tata Kelola (Institusional-Politik)

Setelah basis nilai diperkuat, peradaban suatu bangsa hanya bisa dimajukan dengan ketepatan tata kelola. Daron Acemoglu dan James A. Robinson, dalam bukunya, *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty* (2012), menengarai bahwa sebab pokok kegagalan suatu negara-bangsa bukan karena kurang adidaya atau sumberdaya, melainkan karena salah tata-kelola.

Menurut keduanya, kunci perbedaan antara negara maju dan terbelakang terletak pada institusi sosial-ekonominya yang memberi perbedaan insentif pada individu dan bisnis, yang pada gilirannya tergantung pada rejim kelembagaan politik, hukum dan kebijakannya. Stabilitas politik dan kemakmuran berjangka panjang mengharuskan negara terlebih dahulu menata kelembagaan politiknya secara baik.

Dalam paradigma Pancasila, pengembangan institusi sosial-politik diarahkan untuk memungkinkan pembangunan jiwa (tata nilai) dan raga (tata sejahtera) dalam kerangka perwujudan bangsa yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nilai utama sebagai pedoman tata kelola ini adalah sila keempat. Secara ringkas dapat dikatakan, bahwa tatanan sosial-politik hendak dibangun dengan mewujudkan negara hukum dalam sistematis “kekeluargaan” (gotong-royong), yang mengintegrasikan kekuatan nasional melalui mekanisme demokrasi yang bercita kerakyatan, cita permusyawaratan dan cita hikmat-kebijaksanaan dalam suatu rancang bangun institusi-institusi demokrasi yang dapat

memperkuat persatuan (negara persatuan) dan keadilan sosial (negara kesejahteraan). Dan untuk mewujudkan semua itu, pemerintahan negara mengemban tugas untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan.

Agen utama dalam urusan tata kelola ini adalah para penyelenggara negara dan kepemimpinan politik (*political society dan civil society*). Adapun prioritas rejim politik-kebijakan tersebut adalah menata ulang sistem demokrasi dan pemerintahan dalam kerangka memperkuat persatuan nasional dan keadilan sosial. Untuk itu, berbagai desain institusi demokrasi dan pemerintahan harus ditinjau ulang. Praktik politik tidak dibiarkan sekadar perjuangan kuasa demi kuasa, namun harus mengemban substansi politik dalam rangka menghadirkan berbagai kebijakan yang andal demi memenuhi visi dan misi negara. Kebijakan politik harus merespons tantangan perbaikan tata kelola mental-kultural (tata nilai), tata kelola sumberdaya material (tata sejahtera), serta tata kelola demokrasi dan pemerintahan.

Dalam kaitan dengan tata kelola demokrasi dan pemerintahan, berbagai elemen krusial harus mendapat perhatian yang serius. Beberapa diantaranya menyangkut penataan sistem hukum dan pemulihan kewibawaan otoritas hukum (nomokrasi) yang dapat menopang kesehatan demokrasi, persoalan institusi pemilihan yang padat modal, penataan ulang otonomi daerah, urgensi kehadiran pedoman direktif (haluan pembangunan) yang lebih solid, persoalan tumpang-tindih kewenangan insitusi-institusi negara, terlalu luasnya cakupan kelembagaan negara karena kehadiran beragam komisi negara serta pentingnya perampingan birokrasi negara untuk menghindari jebakan negara pegawai, urgensi pembenahan sistem perwakilan yang lebih inklusif dan representatif dengan kesanggupan mengakomodasi segala kekuatan sosial-politik, serta pentingnya memperbaiki rejim negara kesejahteraan yang bersemangat gotong-royong.

Tata Sejahtera (Material-Teknologikal)

Pada akhirnya, peradaban maju ditentukan oleh kesanggupannya mengolah sumberdaya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Dalam kaitan itu, setiap ideologi harus memiliki kerangka konseptual dan kerangka operatif tentang perwujudan masyarakat sejahtera yang diimpikan.

Pengembangan tata sejahtera dirahkan untuk menjadi bangsa yang mandiri dan berkesejahteraan umum dengan nilai utamanya berladaskan sila kelima. Bahwa kemandirian dan kesejahteraan umum hendak diraih dengan mengupayakan perekonomian merdeka; berlandaskan usaha tolong-menolong (semangat kooperatif), disertai penguasaan negara atas “karunia kekayaan bersama” (*commonwealth*) serta atas cabang-cabang produksi yang

penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; seraya memberi nilai tambah atas karunia yang diberikan dengan input pengetahuan dan teknologi.

Pemangku utama dalam urusan tata sejahtera ini adalah dunia usaha dan rejim perekonomian, dengan prioritas utamanya mengembangkan perekonomian berbasis semangat tolong-menolong (kooperatif). Dengan semangat itu, politik anggaran harus lebih berorientasi pada kesejahteraan umum. Kemampuan negara untuk menguasai dan mengelola kekayaan bersama (*commonweath*) serta cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus disehatkan. Mata rantai produksi dari hulu ke hilir jangan sampai terkonsentrasi di satu tangan. Kemakmuran dan pemerataan ekonomi bisa didorong melalui pengembangan kewirausahaan yang dibekali penguasaan inovasi-teknologi, dengan memprioritaskan pengembangan teknologi berbasis potensi dan karakteristik (kondisi) keindonesiaan. Untuk itu, pengembangan teknologi harus beringsut dari (kelembaman) lembaga riset negara menuju ranah industri-perusahaan; terintegrasi ke dalam sektor produktif.

Pembudayaan Dimensi Ideologi

Selain persoalan ruang lingkup pbumih di tiga ranah peradaban, kemandirian kebudayaan Pancasila juga memerlukan proses aktualisasi tiga dimensi ideologi: keyakinan, pengetahuan dan tindakan.

Tantangan pertama dalam pembudayaan Pancasila adalah bagaimana meyakinkan segenap warga negara bahwa nilai-nilai ideologi Pancasila itu cocok, relevan dan ampuh sebagai titik temu, titik tumpu dan titik tuju dalam kehidupan kebangsaan yang meajemuk. Dalam urusan keyakinan ini, seperti dalam keyakinan keagamaan, bahwa kendati tidak ada seorang pun di antara pemeluk agama (yang masih hidup), yang sudah memasuki sorga atau pun neraka, namun mereka yakin bahwa sorga dan neraka itu ada. Meyakinkan pemeluk agama akan adanya sorga dan neraka itu tidak mengadakan penjelasan-penjelasan rasional, melainkan oleh pendekatan-pendekatan emotif (penghayatan) dengan mengandalkan daya paku dan daya imajinasi dari kekuatan “mitos” (dalam arti positif). Pemupukan keyakinan dengan kekuatan mitos itu menggabungkan antara kekuatan narasi (kisah), daya-daya estetik, permainan, ritual dan simbol.

Pengaruh kisah (sejarah, sastra dan film) terhadap kehidupan tak bisa diremehkan. Tokoh-tokoh dalam karya fiksi kerap kali mempengaruhi hidup, standar moral masyarakat, mengobarkan revolusi, dan bahkan merubah dunia. Dalam konteks pembentukan nasionalisme Indonesia sendiri, Bung Karno pernah menunjukan secara canggih bagaimana mengembangkan berbagai mitos integrasi nasional dengan menautkan keindonesiaan dengan epos kebesaran Majapahit dan Sriwijaya. Dia juga acapkali mencuplik kisah-kisah pewayangan sebagai sumber teladan dalam menumbuhkan keyakinan kepada rakyatnya akan kemampuan bangsa Indonesia melalui berbagai tantangan.

Dimensi estetik dan simbolik dalam menumbuhkan keyakinan terhadap Pancasila itu kian penting dalam menjawab pertumbuhan generasi milineal. Suatu generasi yang lebih terbiasa menafsir dan merespon realitas melalui sarana-sarana simbolik dan ikonik. Dan Indonesia dengan kekayaan kulturalnya yang luar biasa bisa menjadi tambang emas untuk mengembangkan berbagai mitos berbasis ekspresi simbolik, estetik dan permainan dalam menumbuhkan dimensi keyakinan terhadap nilai-nilai Pancasila.

Tantangan kedua dalam pembudayaan Pancasila adalah bagaimana menjelaskan nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan keilmuan secara multidisiplin, antar-disiplin dan trans-disiplin. Tujuannya agar setiap warga negara memahami keluasan dan kedalaman wawasan Pancasila serta konsekuensi-konsekuensi turutunannya ke dalam berbagai bentuk pranata dan lembaga sosial. Dalam kaitan ini, Pancasila juga harus mewarnai segala aspek pendidikan kewargaan. Berbagai teori bisa digunakan untuk menjelaskan perspektif Pancasila mengenai hubungan manusia dengan kosmos, agama dan negara, hak-hak asasi manusia, konsepsi kebangsaan, demokrasi, sistem hukum nasional, keadilan sosial-ekonomi dan seterusnya. Dalam usaha ini, selain kita harus menggali khasanah pengetahuan-kearifan bangsa sendiri, perlu juga dilakukan berbagai studi komparatif dengan pengalaman sejenis di negara-negara lain, karena bagaimana pun juga nilai-nilai Pancasila memiliki dimensi-dimensi yang bersifat universal.

Tantangan ketiga dalam pembudayaan Pancasila adalah bagaimana mendorong warga negara (khususnya peserta didik) untuk dapat mengembangkan laku hidup berdasarkan nilai dan konsepsi Pancasila. Pancasila tidak berhenti sekadar butir-butir hafalan, melainkan menjelma menjadi karakter yang mendarah-daging dalam perilaku warga dalam kehidupan publik. Selama ini, banyak guru mengajarkan pendidikan moral Pancasila seperti dokter yang memberi resep kepada orang sakit. Namun, petunjuk resep itu tak diamalkan oleh sang pasien dengan meminum obatnya; bahkan berusaha membeli obatnya pun tak sudi. Pendidikan karakter adalah ilmu amal (terapan) yang tidak diberikan kecuali untuk diamalkan. Guru mendidik (membudayakan) karakter dengan praktik keteladanan, murid mempelajari ilmu itu dengan mempraktikkan langsung laku terpuji. Pembelajaran Pancasila bisa dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok terbatas yang terdiri dari ragam identitas, lalu mendorong mereka untuk mengembangkan berbagai kegiatan dalam rangka pengamalan langsung sila-sila Pancasila.

Strategi Kebudayaan

Dalam rangka membudayakan Pancasila dalam ketiga ranah peradaban dan tiga dimensi ideologi tersebut diperlukan suatu strategi kebudayaan yang dapat menghubungkan secara kongruen antara sarana dan tujuan, antara aspirasi dan kapabilitas.

Tuntutan strategis dalam memajukan kebudayaan dan peradaban tersebut secara genuin diringkas oleh Ki Hadjar Dewantara dalam istilah “tri-kon” (kontinyu, konvergen, konsentris).

Pertama, gerak kembang kebudayaan dan peradaban itu harus *kontinyu* atau bersambung dengan alam kebudayaan dan cerlang budaya sendiri, dengan potensi sumberdaya sendiri, dengan akar sosial dan kesejarahannya sendiri. Kedua, gerak kembang kebudayaan dan peradaban itu harus *konvergen* dengan semua aliran kebudayaan, segala temuan dan perkembangan kemajuan (dalam berbagai ranah kehidupan) sedunia. Ketiga, dengan mengawinkan elemen-elemen kecermerlangan lokal dan global, diharapkan membuat warga bangsa ini bisa *konsentris* atau bersatu dalam perkembangan alam kebudayaan universal tanpa kehilangan kepribadian nasional (Dewantara, 1977: 206).

Strategi kebudayaan dalam konsepsi Ki Hadjar itu sejalan dengan pokok-pokok haluan kebudayaan yang digariskan dalam Konstitusi Proklamasi. Dalam Penjelasan pasal 32, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, disebutkan. **Pertama**, "Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya." **Kedua**, "Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa." **Ketiga**, "Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya, persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia."

Bersamaan dengan itu, usaha membudayakan Pancasila juga memerlukan terang kesadaran tentang dasar ontologis Pancasila. Pada 1 Juni 1945, dalam mengawali urainnya tentang dasar negara, Soekarno menyerukan "bahwa kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan faham". Lantas ia katakan, "Kita bersama-sama mencari persatuan *Philosophische grondslag*, mencari satu '*Weltanschauung*' yang kita semuanya setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang saudara Yamin setuju, yang Ki Bagoes setuju, yang Ki Hadjar setuju, yang saudara Sanoesi setuju, yang saudara Abikoesno setuju, yang saudara Lim Koen Hian setuju, pendeknya kita semua mencari satu *modus*."

Demikianlah, dasar ontologis (struktur makna terdalam) dari keberadaan Pancasila adalah kehendak mencari "persetujuan" dalam menghadirkan kemaslahatan-kebahagiaan bersama (*al-masalah al-ammah, bonnum comune*) dalam kehidupan kebangsaan Indonesia yang mejemuk.

Maka dari itu, setiap kali kita mengupayakan pembangunan bangsa dengan paradigma Pancasila, setiap kali itu pula kita diingatkan untuk kembali menghayati struktur makna terdalam dari keberadaan Pancasila. Kembali mempertanyakan titik temu, titik tumpu, dan titik tuju kita bersama, di tengah kemungkinan keterpecahan, kerapuhan landasan, dan disorientasi yang melanda kehidupan kebangsaan.

Dalam kerangka mengupayakan titik-titik persetujuan itu, kita harus mengupayakan demokrasi yang tidak berhenti sekadar ritual perebutan kekuasaan lima tahunan dengan obsesi kemenangan sebatas mempecundangi lawan dalam kontestasi pemilihan umum. Kita

harus bisa menghayati hakikat politik sebagai seni mulia mengelola kebijakan publik, dengan mengupayakan keserasian antara pembangunan negara (*state building*) dan pembangunan bangsa (*nation building*), melalui pelibatan partisipasi dan representasi berbagai unsur kekuatan rakyat, sebagai katalis bagi penguatan inklusi budaya, inklusi politik, dan inklusi ekonomi. Semuanya itu diperjuangkan dalam rangka memenangkan dan membahagiakan seluruh bangsa Indonesia, dengan meletakkannya dalam kerangka perwujudan cita-cita nasional: menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.